

RINGKASAN

Siti Nabila
220510177

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
USAHA DALAM PEREDARAN PUPUK
CAMPURAN TIDAK BERLABEL DAN TIDAK
TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN.Bnj)**

**(Dr. Zul Akli, S.H., M.H. dan Teuku Yudi Afrizal, S.H.,
M.H.)**

Sebagai negara agraris, Indonesia sangat mengandalkan sektor pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di dalam upaya meningkatkan produktivitas hasil pertanian tersebut, penggunaan pupuk yang tepat, aman, dan bermutu tinggi menjadi faktor yang sangat krusial bagi para petani. Di luar persoalan kontrol ketersediaan dan harga eceran tertinggi, pasar masih dibayangi oleh maraknya pupuk campuran ilegal yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian, bermerek palsu, atau bahkan tanpa label. Banyak konsumen yang tidak menyadari manipulasi ini akibat kurangnya edukasi terkait regulasi dan izin resmi produk pertanian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku usaha dalam peredaran pupuk campuran menurut Hukum Indonesia serta unsur-unsur tindak pidana dalam peredaran pupuk campuran tidak berlabel dan tidak terdaftar pada Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN.Bnj.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, serta analisis terhadap putusan pengadilan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan Bentuk Pertanggungjawaban Pidana pelaku usaha dalam peredaran pupuk campuran menurut hukum Indonesia yaitu, pertanggungjawaban ini sah dibebankan karena pelaku merupakan subjek hukum perorangan yang cakap, sadar, dan tidak memiliki alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya. Atas dasar pertimbangan yuridis keabsahan alat bukti dan non- yuridis dampak meresahkan bagi petani yang diimbangi sikap sopan terdakwa, Hakim menjatuhkan vonis 4 (empat) bulan penjara dan denda Rp2.500.000,- Meskipun demikian, hasil analisis menunjukkan adanya kelemahan dalam pertimbangan hakim yang kurang menguraikan kedalaman analisis niat batin (*mens rea*) terdakwa, serta penegakan hukum dalam perkara ini belum sepenuhnya optimal dan menyeluruh karena baru berhasil menjangkau pelaku ditingkat lapangan. Unsur-unsur Tindak Pidana dalam peredaran pupuk campuran tidak berlabel dan tidak terdaftar dalam putusan nomor 72/Pid.Sus/2023/PN.Bnj yaitu didasarkan dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor 22 tahun 2019 tentang UUSBPB Pasal 122 jo Pasal 73. Berdasarkan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) Pelaku terbukti memenuhi unsur kesengajaan (*dolus*), di mana ia secara sadar memproduksi dan mengedarkan pupuk tanpa izin demi meraup keuntungan komersial.

Oleh karena itu, diharapkan aparat penegak hukum dituntut profesional dan tidak hanya berfokus pada satu pelaku saja, tetapi juga secara aktif menelusuri dan menindak pihak-pihak lain yang melakukan pengedaran pupuk tanpa label, Langkah ini penting untuk menciptakan efek jera yang lebih luas serta mewujudkan penegakan hukum yang komprehensif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha, Peredaran Pupuk Campuran Tidak Berlabel dan Tidak Terdaftar, dan UU Perlindungan Konsumen.

SUMMARY

Siti Nabila
220510198

Criminal Liability of Business Actors in the Distribution of Unlabeled and Unregistered Mixed Fertilizers Under the Consumer Protection Law (Study of Decision Number 72/Pid.Sus/2023/PN.Bnj)

(Dr. Zul Akli, S.H.,M.H. and Teuku Yudi Afrizal, S.H.,M.H.)

As an agricultural country, Indonesia relies heavily on the agricultural sector to achieve national food security and improve public welfare. In efforts to increase agricultural productivity, the use of appropriate, safe, and high-quality fertilizers is crucial for farmers. Beyond the issue of availability control and the highest retail price, the market remains plagued by the proliferation of illegal fertilizers unregistered with the Ministry of Agriculture, with counterfeit brands, or even without labels. Many consumers are unaware of this manipulation due to a lack of education regarding regulations and official agricultural product permits.

This study aims to analyze the criminal liability of business actors in the distribution of mixed fertilizers under Indonesian law and the elements of criminal acts in the distribution of unlabeled and unregistered mixed fertilizers as outlined in Decision Number 72/Pid.Sus/2023/PN.Bnj.

The research method used is normative juridical research with a statutory and case-based approach. Data were obtained through a literature review covering primary and secondary legal materials, as well as an analysis of court decisions.

*The results of this study indicate the form of criminal liability of business actors in the distribution of mixed fertilizers according to Indonesian law, namely, this liability is legally imposed because the perpetrator is a competent, conscious individual legal subject, and does not have any justification or excuse that can eliminate the unlawful nature of his actions. Based on the legal considerations of the validity of the evidence and the non-legal impacts that disturb farmers which are balanced by the defendant's polite attitude, the Judge sentenced him to 4 (four) months in prison and a fine of Rp2,500,000. However, the results of the analysis show that there are weaknesses in the judge's considerations that do not elaborate on the analysis of the defendant's inner intentions (*mens rea*), and law enforcement in this case has not been fully optimal and comprehensive because it has only succeeded in reaching the perpetrators at the field level. The elements of the Criminal Act in the distribution of unlabeled and unregistered mixed fertilizers in decision number 72 / Pid.Sus / 2023 / PN.Bnj are based on the fulfillment of the elements of the criminal act as referred to in Article 122 in conjunction with 73 number 22 of 2019 concerning UUSBPB. Based on the principle of *geen straf zonder schuld* (no crime without fault), the perpetrator was proven to have fulfilled the element of intent (*dolus*), where he consciously produced and distributed fertilizer without a permit in order to gain commercial profit.*

Therefore, it is hoped that law enforcement officers will not only focus on one perpetrator, but also actively trace and take action against other parties who distribute unlabeled fertilizer. This step is important to create a broader deterrent effect and realize comprehensive and just law enforcement.

***Keywords: Criminal Liability Business Actors, Distribution of Mixed Fertilizers
Unlabeled and Unregistered, and Consumer Protection Law.***